



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSNADI LISA PURNAMA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 699379

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1S7 JUPITER MX 135 CC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA ADV 160 N1N02043L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 160.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 537.500.000

III. HUTANG Rp. 763.630.791

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -226.130.791

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.